



The Influence of Double Jobbing Supra and Political Infrastructure on the Search for Sympathizers in the Election

Aulia Hamdi^{1*}, Dwi Syahroni¹

¹UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Author ✉ aulia.irg@gmail.com*

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Double Jobbing superstructure and political infrastructure in finding sympathizers in the general election. Double Jobbing, which doubles as a role in various power structures, has great potential to influence political dynamics, particularly in terms of mobilizing sympathizers and mobilizing support. Political superstructure refers to formal institutions, such as the executive, legislature, and political parties, while political infrastructure includes non-formal organizations, such as civil society groups and social networks. This study uses a library research method using a conceptual approach and a case approach, with these methods to explore how it influences both structurally and operationally and the long-term impact of democracy. The results of this study show that the existence of Double Jobbing can increase the effectiveness of sympathetic mobilization, but also has the potential to create conflicts of interest and the emergence of oligarchs. Thus, the influence of Double Jobbing in the political superstructure and infrastructure plays an important role in the process of finding sympathizers, but it is necessary to study the impact on democracy and electoral integrity.

Keywords: *Wadas Village, Conflict, Citizenship Politics*

ARTICLE INFO

Article history:

Received

August 03, 2024

Revised

November 20, 2024

Accepted

December 29, 2024

Journal Homepage

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/IJoASER/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

PENDAHULUAN

. Pemilihan umum (pemilu) merupakan pilar utama demokrasi yang melibatkan berbagai elemen politik, baik pada tingkat suprastruktur maupun infrastruktur politik. Dalam sistem politik Indonesia, suprastruktur politik merujuk pada lembaga-lembaga pemerintahan formal seperti Presiden, DPR, dan lembaga negara lainnya, sementara infrastruktur politik meliputi partai politik, organisasi massa, serta aktor-aktor non-pemerintah yang memiliki pengaruh langsung terhadap massa pemilih. Kedua tingkatan ini berinteraksi dalam mempengaruhi hasil pemilu, terutama dalam mencari dan memobilisasi simpatisan. Fenomena *double jobbing*, yaitu individu yang menduduki posisi pada suprastruktur sekaligus aktif dalam infrastruktur politik, menjadi semakin menonjol dalam dinamika pemilu. *Double jobbing* dapat merujuk pada aktor politik yang, selain memegang jabatan publik seperti menteri atau anggota DPR, juga memiliki posisi penting di partai politik, organisasi sosial, atau institusi non-pemerintah lainnya. Peran *double* ini memberikan mereka akses *double* pula baik dalam kebijakan formal maupun dalam pengorganisasian massa pemilih di lapangan (Sahya 2013).

Kombinasi peran tersebut memungkinkan *Double jobbing* untuk memiliki keuntungan strategis dalam pencarian simpatisan. Dari sisi suprastruktur, mereka

dapat menggunakan sumber daya dan jaringan pemerintah untuk mempengaruhi opini publik atau mengambil kebijakan yang dapat memobilisasi dukungan. Dari sisi infrastruktur, mereka dapat memanfaatkan basis massa yang sudah terorganisir di dalam partai politik atau organisasi sosial yang mereka pimpin untuk membangun dukungan lebih luas dan loyal. Namun, keberadaan *Double jobbing* juga menimbulkan berbagai perdebatan. Di satu sisi, peran mereka bisa dilihat sebagai bentuk efektifitas politik, di mana mereka dapat memanfaatkan pengaruh di dua ranah sekaligus untuk mencapai tujuan politik tertentu. Di sisi lain, muncul kekhawatiran terkait konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, serta ketidakadilan dalam kompetisi politik yang sehat. *Double jobbing* berpotensi memperlebar kesenjangan akses antara elit politik dan masyarakat, serta menciptakan ketergantungan politik pada individu tertentu dibandingkan pada sistem demokrasi yang terlembaga (Miriam. 2007)

Dalam konteks pencarian simpatisan pada pemilu, *double jobbing* memainkan peran kunci dalam memobilisasi dukungan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pengaruh mereka baik secara struktural maupun operasional, serta dampak jangka panjang terhadap proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *double jobbing* pada suprastruktur dan infrastruktur politik terhadap pencarian simpatisan dalam pemilihan umum. Dengan memahami peran *double* ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana strategi politik dibentuk dan bagaimana mereka memengaruhi proses demokrasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku akan tetapi pada jurnal. Pendekatan pada penelitian ini yaitu *conceptual approach* dimana pendekatan ini dilakukan dengan menggabungkan konsep-konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi satu sudut pandang, kemudian pendekatan *case approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi (Saifuddin. 2001).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Double Jobbing Secara Struktural dan Operasional

Sistem politik di Indonesia sangatlah tidak asing dengan istilah suprastruktur dan infrastruktur di mana dalam hal ini yang di maksud Suprastruktur dan infrastruktur memiliki pengertian yang berbeda. Suprastruktur politik adalah lembaga formal dalam sistem politik yang memegang kekuasaan resmi, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pejabat dalam suprastruktur berfungsi sebagai pengambil kebijakan yang memengaruhi kebijakan nasional maupun daerah. Sedangkan infrastruktur adalah jaringan atau organisasi formal yang berperan dalam mendukung dan memobilisasi dukungan politik, seperti partai politik, kelompok masyarakat, organisasi keagamaan, atau kelompok kepentingan. Infrastruktur ini lebih berfokus pada hubungan langsung dengan masyarakat, pengorganisasian akar rumput, dan strategi mobilisasi massa. Maka dari itu *double jobbing* merupakan individu yang memegang posisi di dua atau lebih struktur politik yang berbeda, yaitu suprastruktur dan infrastruktur. Ini berarti bahwa seorang pejabat memiliki peran *double* baik dalam bagian lembaga formal

maupun aktor dalam jaringan politik seperti partai politik atau organisasi massa (Budiarjo 2007).

Secara struktural pejabat yang memiliki peran pada suprastruktur dan infrastruktur politik dapat memanfaatkan jabatannya atas dukungan politik melalui kebijakan dan otoritas formal. Salah satunya ketika pejabat suprastruktural memanfaatkan kebijakan pemerintahan untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada partai politik atau kelompok tertentu dalam merancang kebijakan ekonomi, sosial atau pembangunan yang nantinya berdampak pada simpatisan masyarakat untuk memilihnya dalam pemilihan umum. Bisa juga pejabat suprastruktur tersebut memanfaatkan sumber daya negara, misalnya memberikan proyek-proyek yang menguntungkan satu daerah atau kelompok tertentu yang nantinya berharap dukungan politik. sumber daya ini bisa berupa program bantuan sosial, infrastruktur, atau proyek pengembangan yang biasanya diberi berbentuk "hadiah" untuk komunitas pemilih. Begitu juga dalam posisi formalnya dalam pemerintahan pejabat suprastruktural memiliki otoritas formal yang memberikan mereka akses ke birokrasi dan aparatur negara. Mereka dapat memobilisasi dukungan melalui instrumen pemerintah, misalnya jaringan aparatur sipil negara (ASN) yang bisa dijadikan dukungan kampanye politik secara tidak langsung (Mukhlis 2024).

Secara operasional pejabat *Double* biasanya banyak menggerakkan pada sektor infrastruktur politik untuk menggerakkan simpatisan dan dukungan selama proses pemilihan umum. Pengaruhnya dapat memobilisasi masamelaalui jaringan politik seperti partai atau organisasi masyarakat yang dapat memobilisasi secara langsung. Mereka dapat menggerakkan para relawan, mengorganisir jaringan partai dalam kampanye, dan menggalang dukungan di kalangan pemilih. *Double Jobbing* juga bisa melakukan jaringan infrastruktur untuk melakukan kampanye yang lebih terkoordinasi dan kampanye yang lebih efektif. Merka juga bisa melakukan kegiatan kampanye di lapangan, rapat umum, kampanye *door to door*, dan strategi penggalangan dana yang solid karena adanya struktur yang kuat di akar rumput. Pejabat ini juga sering menggunakan simbol identitas, seperti agama, etnis, atau ideologi politik tertentu untuk menarik simpatisan terhadap komunitas- komunitas tertentu. Tentu strategi ini dapat meningkatkan sentimen kebersamaan si antara simpatisan dan mendorong mereka untuk mendukung kandidat dalam pemilihan umum (Wardatur 2024).

Dampak Jangka Panjang Bagi Demokrasi

Demokrasi idealnya bertumbuh pada prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan pembagian tanggung jawab di antara berbagai aktor sistem politik. Secara teori, oemisan ini dimaksudkan untuk menghindari monopoli kekuasaan oleh individu maupun kelompok. Menurut Montasque dalam teori Trias Politik menekankan pentingnya memisahkan kekuasaan menjadi tiga cabang utamayaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, ketika pejabat memegang jabatan *Double* di dua tingkatan struktural yang berbeda anatar suprastruktur dan infrastruktur hal ini dapat mengakibatkan distorsi dalam sistem *cecks and balances*. Ini dapat mengakibatkan prinsip-prinsip demokrasi menjadi lemah seperti akuntabilitas, transparansi, dan keterwakilan rakyat (Rifqi. 2023). Beberapa dampak jangka panjang demokrasi yang berpotensi pada *double jobbing* yang memegang peran pada suprastruktur dan infrastruktur politik, sebagai berikut :

Konsentrasi Kekuasaan

Pejabat yang memiliki jabatan *double* berpotensi mengakumulasi kekuasaan yang terlalu besar di tangannya. Hal ini dapat menciptakan ketimpangan kekuasaan yang

mengakibatkan kekuasaan dan memungkinkan individu tersebut untuk mengontrol berbagai aspek dari pemerintahan dan proses politik. Ini dapat mengakibatkan bangkitnya oligarki dalam demokrasi, dimana hanya sebagian saja yang akan mengendalikan secara besar dalam demokrasi. Tidak hanya itu pada konsentrasi kekuasaan juga dapat mengakibatkan rusaknya prinsip demokrasi yang mengutamakan distribusi kekuasaan agar setiap komponen pemerintahan bisa saling mengawasi (Uswatun 2023).

Menurunnya Akuntabilitas dan Transparansi

Demokrasi menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi dalam penganbalian kekuasaan politik. Akan tetapi ketika seorang pejabat yang memiliki jabatan Double pada struktur maka pertanggungjawaban publik atas kebijakan akan menjadi tidak jelas. Misalnya ketika keputusan yang diambil di level suprastruktural bisa didorong oleh kepentingan yang bersifat infrastruktural atau sebaliknya. Dalam hal ini bisa berakibat pada proses check and balance yang merupakan fondasi dari sistem demokrasi, dimana berbagai kekuatan politik saling mengawasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Terjadinya Konflik Kepentingan

Pejabat yang memiliki jabatan *double* pada suprastruktur dan infrastrukur juga dapat menghadapi konflik kepentingan di mana pada kebijakannya yang diambil di suatu tingkatan dapat menguntungkan perannya di tingkat lain, misalnya kebijakan publik yang seharusnya untuk umum ini malah di peruntukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Ini dapat mengakibatkan melemahnya demokrasi dan menurunkan kepercayaan publik. Maka ini menjadi kekhawatiran demokrasi jangka panjang apabila memiliki jabatan Double tersebut.

Melemahnya Partisipasi Politik Masyarakat

Seiring waktu adanya *double jobbing* ini dengan kekuasaan yang besar dapat mengurangi ruang partisipasi politik masyarakat. Sehingga masyarakat mengangkap tidak ada lagi ruang untuk berperan serta dalam proses politik karena kekuasaan terlalu terkonsentrasi pada segelintir orang yang memiliki peran Double. Sehingga dapat mengakibatkan kondisi dimana individu atau kelompok merasa terasing atau terpisah dari sistem politik. Merasa bahwa tidak memiliki pengaruh atau kendali terhadap proses politik atau pemerintahan, merasa diabaikan, atau tidak percaya pada efektivitas institusi politik, atau bisa di sebut juga terjadinya alienasi politik (Gaffa.199).

Maka dari itu pada uraian di atas pada dampak panjang demokrasi negara harus berperan penting dalam mengatasi *double jobbing* pada suprastruktur dan infrastruktur politik agar tidak terjadi melemahnya demokrasi. Sehingga negara perlu memberlakukan regulasi mencegah seorang pejabat memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur suprastruktur dan infrastruktur politik secara bersama. Negara juga harus memperkuat lembaga pengawas, lembaga antikorupsi dan media independen agar dapat mengawasi pejabat yang memegang jabatan Double agar mereka tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Sehingga transparansi dan keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan politik harus ditingkatkan agar pejabat yang memiliki jabatan Double tersebut dapat bertanggungjawab dihadapan publik (Gaffar.2018).

KESIMPULAN

Double jobbing pada suprastruktur dan infrastruktur politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencarian simpatisan dalam pemilihan umum. Secara struktural, pejabat tersebut dapat memengaruhi kebijakan publik dan memanfaatkan

sumberdaya negara untuk keuntungan politik. Secara operasional mampu memobilisasi masa dan dukungan kampanye melalui jaringan informal yang kuat. Meskipun memiliki keuntungan yang besar dalam mencapai simpatisan akan tetap memiliki risiko yang besar pula sehingga berakibat terjadinya ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak proses demokrasi. Sehingga kekuasaan tersebut dapat melemahkan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang bisa mengganggu *checks and balance* dan mengkisi kepercayaan publik sehingga munculnya oligarki atau sistem pemerintahan yang kurang akuntabel. Sehingga pejabat tersebut harus mampu menjaga keseimbangan atas peran Double jabatannya agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaannya, maka negara harus menciptakan mekanisme yang efektif guna mengawasi *double jobbing* dan memastikan demokrasi berjalan dengan prinsip keterwakilan dan transparan yang kuat.

REFERENSI

- Abdul Gaffar, dkk. *Rezim Lokal*, (yayasan obor indonesia, 2018) Dr.Sahya Anggara, M.Si. *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung, Penerbit Pustaka Setia, 2013), hal. 46.
- Gaffar, A. (1997). "Menampung Partisipasi Politik Rakyat." Gaffar membahas tentang menampung partisipasi politik rakyat dalam jurnal ilmu sosial dan ilmu politik.
- Miriam Budiardj, *Fundamentals of Political Science*, 1st Ed. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007)
- Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, edisi revisi (Jakarta, PT Gramedia Pustaka, 2007).
- Muklis Siregar and Elly Warnisyah Harahap, "Suprastruktur Dan Infrastruktur Politik Dalam Kehidupan Demokrasi," *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10181-89, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Rifqi Nurdiansyah and Doli Witro, "Muslim Politics: Political Model of Islamic Law in Adat Societies," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 57, no. 2 (2023): 309-31.
- Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 2001)
- Uswatun Hasanah et al., "Etika Dan Budaya Politik "Konsep Sistem Politik Di Indonesia"," *Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi* 1, no. 2 (2022): 330-43, <https://doi.org/10.47233/jpst.v1i2.418>.
- Wardatul Mutmainnah and Siti Tiara Maulia, "Penerapan Sistem Demokrasi Untuk Menjaga Persatuan Dan Konstitusi Serta Penegakan Hukumnya," *Journal of Practice Learning and Educational Development* 4, no. 2 (2024): 111-17, <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.284>

Copyright Holder :

© Aulia Hamdi Dwi Syahroni (2024).

First Publication Right :

© International Journal on Advanced Science, Education, and Religion (IJoASER)

This article is under:

